

PERAN PEMERINTAH DESA KETAPANG DALAM PENGEMBANGAN BUMDes CALIFOUR

Oleh:

Emy Dewi Pramita,

Lailul Mursyidah

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2023

Pendahuluan

**Undang- Undang
Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa**

**Peraturan Desa Ketapang
Nomor 08 Tahun 2021
Tentang Rencana Jangka
Menengah Desa
(RPJMDes)**

**Kondisi Sungai
Affour**

Bahwa membuat Pemerintah Desa bersama masyarakat lebih ekspresif disaat membangun desa dengan segala sumber daya yang dimilikinya

Dalam RPJMDes ini tertuang untuk revitalisasi pemanfaatan sungai untuk meningkatkan kualitas lingkungan juga area taman wisata desa yang kedepannya akan dikelola oleh BUMDes Delta Mandiri desa Ketapang di desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Sungai affour sepanjang 1000 meter yang membentang di tengah-tengah desa masih dijadikan tempat pembuangan sampah dan belum adanya tindakan atau pemanfaatan terhadap sungai itu sendiri

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah dalam desa Ketapang dalam pengembangan BUMDes Califour ?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat Pemerintah dalam desa Ketapang dalam pengembangan BUMDes Califour?

Metode

FOKUS & LOKASI PENELITIAN

Peran Pemerintah desa Ketapang dalam mengelola BUMDes Kalifour yang berlokasi di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo

JENIS & TEKNIK PENELITIAN

Jenis penelitian Deskriptif Kualitatif dengan Teknik Purposive Sampling

INFORMAN

1. Kepala Desa Ketapang
2. Sekretaris Desa Ketapang
3. Pengurus BUMDes Mandiri Delta
4. 3 Orang Warga desa Ketapang

Hasil

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat empat peran yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Ketapang yaitu : sebagai Regulator Pemerintah memberikan pengarahan guna menyalurkan penyelenggaraan pembangunan yang ditetapkan melalui Peraturan desa Nomor 08 Tahun 2020 ,sebagai Dinamisator pemerintah desa mempunyai kesungguhan dengan memberikan pengarahan, dapat mengajak warga guna terbangunnya partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan hingga terwujudnya Califour,sebagai Fasilitator pemerintah desa bergerak dibidang pendampingan melalui pengawasan serta dibidang pembiayaan atau pendanaan lewat penerimaan bantuan dana kepada BUMDes Delta Mandiri sebagai pengelola Califour dan sebagai Katalisator pemerintah desa berkedudukan sebagai lembaga yang mempercepat pengembangan potensi desa. Dalam menjalankan peranannya juga tidak lepas dari Faktor pendukung yaitu kesediaan fasilitas fasilitas, adanya kebijakan khusus mengenai pengurus, adanya bimbingan dan pengawasan. Sedangkan untuk faktor penghambat yang dijumpai adalah minimnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan khususnya sungai affaour.

Pembahasan

REGULATOR

Peran regulator pemerintah desa merumuskan peraturan melalui Peraturan desa Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Desa (RPJMDes) dan rencana terkait pengembangan Kalifour, yang dikelola oleh BUMDes Delta Mandiri

FASILITATOR

sebagai fasilitator pemerintah desa bertindak pada bidang pendampingan lewat pengawasan juga dibidang pembiayaan atau pendanaan melalui pemberian bantuan dana kepada BUMDes Delta Mandiri sebagai pengelola Kalifour.



DINAMISATOR

Sebagai Dinamisator, pemerintah desa mempunyai kemampuan dengan mengkontribusi berupa pendampingan dan pengarahan, Bersama sama dengan warga agar terwujudnya rasa empaty warga agar berpartisipasi pada setiap pembangunan

KATALISATOR

Sebagai katalisator dalam hal ini pemerintah desa berkedudukan layaknya sebagai lembaga yang dengan cepat dalam peningkatan potensi desa. sehubungan dengan bagaimana pemerintah desa dalam mengkondisikan secara langsung dalam hal ini sebagai motorik perkembangan pembangunan.

Temuan Penting Penelitian

FAKTOR FAKTOR



PERTAMA

kondisi sempadan sungai affaour sebagai wahana penunjang dalam mewujudkan kalifour yang cukup baik

KEDUA

Adanya sinergi dari lapisan masyarakat yang mendukung dan membantu terwujudnya kalifour sebagai wahana rekreasi dan edukasi sekaligus potensi pengembangan ekonomi bagi warga sekitar

KETIGA

Adanya pembinaan yang berkesinambungan dan memperoleh pengawasan baik secara internal maupun eksternal

KEEMPAT

Adanya bantuan melalui APBDes

Temuan Penting Penelitian

FAKTOR FAKTOR

PERTAMA

masih minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan terutama dalam hal pembuangan sampah di kawasan sungai affaour desa Ketapang yang masih sering dilakukan oleh warga

KEDUA

perhatian masyarakat terhadap potensi kalifour sebagai asset yang semestinya dapat dijadikan sebagai pemberdayaan perekonomian masih rendah

KETIGA

minimnya dana sebagai biaya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur kalifour.

PENGHAMBAT

Manfaat Penelitian

❖ Manfaat Teoritis

- a) Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstibusi secara teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

❖ Manfaat Praktis

- a) Bagi instansi diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam mengembangkan Califour sebagai objek yang mempunyai nilai manfaat dan fungsi bagi masyarakat luas

Referensi

- [1] S. Soekanto, “Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi,” *Jakarta Bumi Aksara*, 2002.
- [2] K. Adimihardja and I. H. Hikmat, *participatory research appraisal: dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*. Humaniora, 2003.
- [3] T. A. Verawati, “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo,” *Makassar Univ.*, vol. 45, 2003.
- [4] H. Alam, “Ilmu Pengetahuan Sosial (konsep Pemberdayaan masyarakat),” *Jakarta: Erlangga*, 2006.
- [5] D. Sugiyono, “Memahami penelitian kualitatif,” 2010.
- [6] M. Nurdin, S. Nurmaeta, and M. Tahir, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa,” *Otoritas J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 4, no. 1, 2014.
- [7] M. Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan (suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya)*. Rajawali Pers, 2014.
- [8] D. C. Larasati, “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang,” *Reformasi*, vol. 9, no. 2, pp. 161–167, 2019.
- [9] A. Yani, S. Marlina, and T. E. K. Lestiyani, “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TANJUNG LANJUT KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI.” UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- [10] F. H. U. Laru and A. Suprojo, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” *JISIP J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 8, no. 4, pp. 367–371, 2019.

Referensi

- [11] N. Nur Amalia Reska, “PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TENTANG ATURAN PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PUSAT NIAGA KOTA PALOPO.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.
- [12] Z. Chikmawati, “Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia,” *J. Istiqro*, vol. 5, no. 1, pp. 101–113, 2019.
- [13] H. Anwar, “Peranan Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone,” *Univ. Muhammadiyah Makassar*, 2020
- [14] A. Raintung, S. Sambiran, and I. Sumampow, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow,” *GOVERNANCE*, vol. 1, no. 2, 2021.
- [15] H. N. Putri, S. Resmana, H. Atthahara, and L. Aryani, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi,” *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 8, no. 10, pp. 353–358, 2022.

